BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Kesepakatan ASEAN-China *Free Trade Area* (ACFTA) merupakan kesepakatan dalam penurunan tarif bea masuk secara bertahap sejak tahun 2005 dan dilaksanakan oleh ASEAN-6 termasuk Indonesia dan China dan mulai diimplementasikan sepenuhnya berupa penerapan tarif nol persen sejak 1 Januari 2010 silam.

Dalam implementasi perdagangan bebas di skema ACFTA khususnya kesepakatan antara Indonesia dan China terlihat China lebih mendapatkan banyak keuntungan terutama di bidang industri tekstil dan produk tekstil (TPT). China yang merupakan salah satu pesaing utama Indonesia dalam bidang tekstil dapat menghasilkan harga produk yang lebih murah dibandingkan produk yang dihasilkan industri TPT Indonesia. Hal ini dikarenakan di China sudah tersedia bahan mentah seperti kapas yang di Indonesia sendiri belum bisa mengembangkan kapas sehingga masih harus mengimpor ke beberapa negara penghasil kapas. Selain itu, energi listrik yang merupakan instrumen penting dalam industri tekstil memiliki tarif dasar yang berbeda antara Indonesia dan China. Tarif dasar listrik di China termasuk murah karena disubsidi oleh pemerintah China, sedangkan di Indonesia tarif dasar listrik terus menerus naik setiap tahun. Memang dari segi kualitas, produk tekstil Indonesia dapat dikatakan lebih unggul dibandingkan kualitas produk tekstil asal China. Tetapi, dengan teknologi yang lebih canggih

China dapat menghasilkan produk secara massal sehingga distribusi produk tekstil mereka dapat tersebar secara lebih luas dan lebih cepat.

Pemerintah Indonesia khususnya Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian menyiapkan beberapa strategi dalam menghadapi ketatnya persaingan dengan China di bidang industri TPT dalam skema ACFTA ini. Hal yang paling pertama kali dilakukan pemerintah Indonesia untuk siap bersaing dengan China adalah dengan membenahi kesiapan Industri TPT Indonesia untuk menghadapi China dalam ACFTA dengan cara mengamankan pasar domestik melalui promosi penggunaan produk dalam negeri serta penggunaan standar nasional Indonesia (SNI).

Selain itu pemerintah juga berusaha untuk meningkatkan daya saing industri TPT di Indonesia agar siap bersaing penuh dengan China melalui pelaksanaaan restrukturasi dan moderenisasi permesinan TPT serta penghilangan hambatan importasi kapas asal China agar meringankan beban pelaku industri TPT mengingat kapas merupakan bahan utama dalam indutri tekstil dan Indonesia masih belum bisa mengembangkan kapas.

. Pemerintah Indonesia juga memiliki strategi lain yaitu dengan penguatan ekspor TPT Indonesia ke China melalui penguatan peran peran perwakilan Indonesia di China baik atase perdagangan (ATDAG) dan pemanfaatan *Indonesian Trade Promotion Center* (ITPC) di China dan juga melalui kebijakan politik luar negeri Indonesia terhadap China difokuskan utuk lebih *concern* terhadap pengaruh ACFTA bagi sektor TPT. Adapun penandatanganan *Agreed Minutes of The Meeting for Further Strenghtening Economic and Trade*

Cooperation antara Menteri Perdagangan Indonesia dan Menteri Perdagangan China pada tahun 2010 yang merupakan kesepakatan langkah-langkah bersama kedua pemerintah untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh sektor-sektor tertentu di Indonesia yang terkena dampak oleh *ASEAN-China Free Trade Area* (ACFTA).

Namun, beberapa strategi yang dilancarkan oleh pemerintah Indonesia tidak sepenuhnya berjalan dengan mulus. Masih ada strategi-strategi yang hanya bersifat normatif tanpa *action plan* yang nyata. Strategi yang dibuat oleh pemerintah kurang bisa memberikan jaminan kepada masyarakat Indonesia khususnya kalangan industri TPT. Pasca implementasi ACFTA pada 2010 silam, kekhawatiran para pelaku industri TPT terbukti. Produk tekstil impor yang berasal dari China terbukti sangat memenuhi pasar industri lokal. Sebaliknya, produk TPT lokal yang berusaha masuk ke pasaran China dirasa cukup sulit mengingat China merupakan pesaing utama Indonesia selain India yang merupakan sesama kompetitor di bidang industri tekstil. Selain itu,standar nasional yang diberlakukan oleh China terbilang cukup menyulitkan pengusaha tekstil dalam negeri untuk mengekspor produk mereka ke China.

TPT Indonesia belum mampu memaksimalkan penetrasi pasar China sebagaimana produk China di Indonesia. Hal yang lebih menghawatirkan, produk TPT lokal malah harus kalah saing dan kehilangan pamor di negara sendiri karena harga yang lebih mahal dan cenderung kurang inovatif. Menurunnya permintaan TPT lokal tentu berdampak pada kelangsungan industri TPT terutama industri menengah dan kecil karena produk mereka diorientasikan untuk pasar domestik.

Akibatnya, banyak pabrik-pabrik atau industri tekstil di Indonesia yang tutup atau beralih menjadi pedagang bukan produsen, dan pengangguran akan meningkat mengingat industri tekstil merupakan industri yang cukup besar dan dapat memperkerjakan lebih dari 1500 orang di setiap pabriknya.

Pemerintah melihat manfaat dari ACFTA karena pasar China yang besar tanpa melihat kesiapan industri apakah mampu memenuhi standar produk yang diminati pasar China. Kendala dalam menjalan strategi pemerintah untuk menghadapi China terkait ACFTA juga mulai terlihat selama periode 2010-2013. Diantaranya, program penggunaan produk dalam negeri yang kurang efektif, penerapan SNI yang kurang maximal, dana untuk restrukturasi dan moderenisasi permesinan yang tidak sebanding dengan banyaknya industri TPT yang ada di Indonesia, importasi kapas asal China yang ternyata berkualitas kurang baik, infrakstriktur Indonesia yang belum memadai, serta mahalnya distribusi energi dan listrik di Indonesia.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perindustrian mengaku kecolongan atas implementasi ACFTA ini. Pihak mereka telah mencoba untuk meminta penangguhan penerapan tarif 0% ini bagi sektor industri TPT, tapi sudah jelas permohonan ini ditolak oleh pihak China atas dasar Indonesia sudah menandatangani berjalannya ACFTA ini sejak tahun 2004.

Ada beberapa peluang industri TPT Indonesia pasca diterapkannya ACFTA yaitu masuknya investasi asal China berupa berdirinya pabrik atau industri tekstil asal China di Indonesia, yang sayangnya hingga akhir tahun 2013 peluang

tersebut belum terwujud. Serta hilangnya hambatan tarif produk Indonesia ke China yang semula berkisar antara 17,5% hingga 25%.

5.2 Saran

Dalam bagian akhir, peneliti ingin mengajukan beberapa saran terkait permasalahan yang ada untuk dapat dilakukan penelitian-penelitian yang lebih lanjutjika memungkinkan dapat ditindak lanjuti lebih lanjut oleh pemerintah Indonesia. Saran yang diajukan oleh peneliti adalah:

1. Kebijakan - kebijakan pemerintah Indonesia untuk dalam negeri sebaiknya lebih ditekankan pada pengurangan biaya ekonomi tinggi seperti infrastruktur, energi dan listrik, serta impor kapas dari negara - negara yang memiliki hasil kapas yang baik, serta kemudahan birokrasi bagi pelaku-pelaku industri tekstil di Indonesia.
2. Dalam mengamankan pasar produk lokal, sebaiknya kegiatan jual beli SNI oleh China maupun oleh negara-negara lain dihentikan karena akan merugikan konsumen maupun produsen TPT di Indonesia.
3. Pemerintah baik ditingkat pusat maupun daerah harus lebih agresif melaksanakan pameran produk dalam negeri ke China ataupun pameran di Indonesia namun yang berskala internasional.
4. Infrastruktur di Indonesia diharapkan dapat berkembang lebih baik dan lebih cepat untuk mempermudah pengusaha industri TPT lokal mengimpor bahan mentah yang dibutuhkan ataupun mengekspor produk mereka ke

China dan negara lainnya secara lebih cepat sehingga biaya yang dikeluarkan juga dapat terpangkas.

5. Pemerintah harus lebih merangkul pengusaha industri TPT lokal untuk melebarkan jaringan informasi mengenai kebutuhan masyarakat di China agar dapat meningkatkan ekspor TPT Indonesia ke China.
6. Sumber daya manusia di Indonesia harus lebih ditingkatkan. Misalnya, pemerintah membuka lebih banyak lagi lembaga-lembaga pelatihan yang gratis agar kualitas SDM semakin baik lagi untuk menciptakan hasil TPT yang lebih berkualitas.
7. Pemerintah harus lebih sering lagi mengadakan pertemuan secara bilateral dengan China terkait dampak-dampak negatif dari ACFTA.
8. Terakhir, ekspor migas dan pertambangan yang menjadi primadona ekspor Indonesia sebaiknya tidak dieksploitasi berlebih sehingga dapat mengancam keamanan distribusi energi yang padahal bisa menjamin distribusi suplai energi menjadi lebih murah kepada industri-industri TPT nasional.